

Skripsi  
Program Sarjana Ilmu Hukum  
Semester Genap 2018/2019

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KETERTIBAN SOSIAL  
TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2002  
TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**

Cut Wahidah Mumtaza  
NPM: 1551071

Abstrak

Gelandangan dan Pengemis sering ditemui di beberapa tempat fasilitas umum di Kota Batam, kehadirannya dianggap dapat memicu permasalahan seperti kejahatan, kekerasan yang dapat meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Disini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berperan untuk menaungi, menertibkan permasalahan yang ada pada gelandangan dan pengemis yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial.

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan yang tujuannya untuk dapat menemukan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan ketertiban sosial terhadap gelandangan dan pengemis belum efektif hal ini disebabkan oleh faktor budaya yang dalam teori efektifitas hukum adalah telah menjadi budaya bukan hal yang tabu jika seorang pengemis dan gelandangan diberikan sejumlah dana atau sumbangan oleh masyarakat, sehingga mereka menjadi malas-malasan untuk dapat bekerja jauh lebih baik, karena dengan menjadi gelandangan dan pengemis mampu untuk menghasilkan uang yang banyak tanpa harus bekerja keras.

Maka peneliti mengharapkan agar pemerintah dapat merevisi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial berupa penerapan sanksi yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemberi sumbangan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Batam.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Ketertiban Sosial, Gelandangan dan Pengemis*